J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.3, April 2025

Analisis Framing Pemberitaan Pemilu Presiden 2024 Pada Media Online Kompas.com dan Suara.com

Anggry Swasty Pello[1], Ester Krisnawati[2], Amir Machmud NS[3]
[1,2,3] Universitas Kristen Satya Wacana
E-mail: anggryswpello@gmail.com, ester.krisnawati@uksw.edu, amirmachmudns@gmail.com

Article History:
Received: 24 Februari 2025
Revised: 30 Maret 2025
Accepted: 07 April 2025

Keywords: *Berita, Framing, kompas.com Pemilu, suara.com*

Abstrak : *Pemilu Presiden 2024 menjadi momen politik penting di Indonesia yang menarik perhatian publik dan media massa. Penelitian ini bertujuan menganalisis framing pemberitaan kompas.com dan suara.com. Dengan menggunakan metode analisis framing Pan dan Kosicki, penelitian ini menelaah struktur sintaksis, skrip, tematik, dan retoris dalam berita yang dipublikasikan oleh kedua media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompas.com lebih fokus pada aspek institusional dan netralitas kebijakan KPU, sedangkan suara.com menonjolkan konflik politik antar tim kampanye. Kedua media memiliki pendekatan framing yang berbeda: kompas.com lebih menekankan penjelasan formal, sementara suara.com mengangkat dinamika dan ketegangan politik. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur tentang media dan demokrasi, kajian komunikasi politik, terutama dalam era digital di mana media online memiliki pengaruh yang sangat besar.*

PENDAHULUAN

Pemilu Presiden 2024 di Indonesia merupakan agenda politik terbesar yang dinantikan oleh masyarakat. Sebagai mekanisme demokrasi yang menentukan arah masa depan bangsa, pemilu ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik para kandidat tetapi juga menjadi perhatian masyarakat luas dan menarik sorotan media, baik dalam maupun luar negeri. Media massa, terutama media online, memegang peranan penting dalam membentuk opini publik melalui penyampaian informasi mengenai kandidat, program kerja, hingga isu-isu yang muncul selama proses pemilu berlangsung

Menurut (Puspianto, 2022), Media massa sebagai sarana pemberian informasi memiliki peran penting dalam penyebaran isu isu yang berkembang di masyarakat. Lebih khususnya media massa memiliki kekuatan dalam penyebaran opini publik atau *public opinion.* Dimana opini publik tersebut merupakan sebuah fenomena dalam kehidupan sosial yang kemudian mampu membentuk apa yang harus dipikirkan oleh publik atau masyarakat itu sendiri.

Media massa memiliki fungsi utama sebagai penyampai informasi serta pengawas pelaksanaan demokrasi. Dalam konteks pemilu, media menjadi *medium* yang menghubungkan masyarakat dengan para kandidat, baik melalui pemberitaan mengenai program kerja, visi-misi, maupun isu-isu politik yang berkembang selama proses pemilu. Keberadaan media membantu

masyarakat memahami proses pemilu dan membangun kesadaran politik. Namun, media juga dapat menjadi alat untuk membingkai atau memengaruhi opini publik melalui cara penyampaian informasi.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media online telah mengambil peran dominan dalam penyebaran berita di era digital. Media online menawarkan akses yang cepat, mudah, dan luas terhadap informasi, menjadikannya sumber berita utama bagi masyarakat modern. Dalam pemilu, media online memegang kendali besar dalam membentuk narasi politik, terutama melalui pemberitaan yang sering kali dibingkai berdasarkan sudut pandang tertentu (*framing*).Dengan meningkatnya konsumsi informasi secara digital, pemberitaan media online tentang Pemilu Presiden 2024 menjadi faktor penting yang dapat memengaruhi persepsi dan preferensi pemilih.

Di setiap penulisan berita selalu mempunyai latar belakang atau ideologis dari penulis yang berbeda sesuai dengan sudut pandang penulis.Penulis akan memasukkan ide dalam setiap analisis terhadap data-data yang diperoleh dilapangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Silvanus Alvin dari Universitas Multimedia Nusantara tahun 2022 membahas tentang "Analisis Framing isu Penundaan Pemilu 2024 Di *cnn.indonesia.com* dan *kompas.com*. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan fokus dalam pemberitaan kedua media. *cnn.indonesia.com* lebih menitikberatkan pada individu, khususnya Luhut Binsar Pandjaitan, yang dianggap sebagai tokoh utama di balik wacana penundaan pemilu. Pemberitaannya lebih banyak mengaitkan isu tersebut dengan peran dan pernyataan Luhut, sehingga membangun persepsi bahwa ia memiliki tanggung jawab besar dalam polemik yang terjadi.Sebaliknya, *kompas.com* mengambil pendekatan yang lebih luas dengan tidak secara khusus menyoroti Luhut sebagai individu.

Media ini membingkai isu penundaan pemilu dalam konteks yang lebih menyeluruh, yaitu sebagai bagian dari kebijakan dan dinamika dalam pemerintahan. Dengan demikian, framing yang digunakan oleh *kompas.com* lebih menampilkan isu ini sebagai keputusan yang melibatkan berbagai pihak dalam pemerintahan, bukan hanya berfokus pada satu tokoh tertentu. Perbedaan framing ini mencerminkan strategi pemberitaan masing-masing media dalam mengangkat isu politik, di mana *cnn.indonesia.com* lebih menonjolkan peran individu, sementara *kompas.com* lebih menyoroti aspek institusional dan kebijakan secara kolektif.(Alvin, 2022)

Penelitian serupa lainnya dilakukan oleh Rosmilawati pada tahun 2022 dari universitas Darma Agung dengan topik "Analisis Framing Pemberitaan tentang pemilihan umum Kepala Daerah calon Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2020 pada portal media online *tabengan.co.id* dan *prokalteng.co* ". Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua media tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam membingkai pemberitaan terkait pasangan calon. *tabengan.co.id* lebih memfokuskan pada aspek dukungan dan respons masyarakat terhadap pasangan calon..Pemberitaannya banyak berfokus pada bagaimana masyarakat menerima, mendukung, atau merespons pencalonan kandidat, termasuk melalui survei opini publik, deklarasi dukungan, serta dinamika politik di kalangan masyarakat umum. Dengan demikian, media ini lebih menyoroti sentimen publik dan antusiasme masyarakat dalam proses pemilihan. Sementara itu, *prokalteng.co* lebih menekankan pada program kerja serta visi dan misi pasangan calon. Pemberitaannya lebih banyak membahas agenda kebijakan yang ditawarkan kandidat, termasuk rencana pembangunan, strategi ekonomi, dan program sosial yang akan dijalankan jika terpilih. Dengan fokus ini, *prokalteng.co* memberikan gambaran yang lebih substantif mengenai kapasitas dan rencana kerja masing-masing pasangan calon. Perbedaan framing ini mencerminkan bagaimana masing-masing media memilih sudut pandang yang berbeda dalam memberitakan Pilkada 2020, di mana

tabengan.co.id lebih menyoroti aspek dukungan publik, sedangkan *prokalteng.co* lebih mengedepankan substansi program dan kebijakan calon pemimpin.(Rosmilawati et al., 2022)

Berdasarkan fenomena ini penulis mencoba menganalisis bagaimana media online khususnya *kompas.com* dan *suara.com* dalam membingkai pemberitaan mengenai Pemilu presiden 2024. Penulis memilih media ini karena *kompas.com* adalah salah satu pionir media online di Indonesia yang pertama kali hadir di Internet pada 14 September 1995 dengan nama Kompas Online. Portal berita ini me-*rebranding* dirinya menjadi *kompas.com*. Merujuk pada *brand* Kompas yang dikenal selalu menghadirkan jurnalisme yang memberi makna . Disisi lain, media *suara.com* pertama kali berdiri pada 11 Maret 2014 yang menyajikan informasi terhangat baik peristiwa politik, bisnis, hukum, sepakbola, entertaiment, gaya hidup, hingga jurnalisme warga yang dikemas dengan bahasa yang ringan dan lugas. Dalam penelitian ini berita yang di analisis adalah berita yang membahas tentang pemberitaan usai debat capres dan cawapres yang diberitakan selama 3 hari berturut-turut yaitu berita tanggal 3, 4 dan 5 Desember 2023.

LANDASAN TEORI

Teori yang digunakan adalah Teori Konstruksi media massa yang dikemukakan oleh Bungin, Peter L. Berger dan Thomas Luckman berpendapat bahwa realitas sosial dibentuk secara bersamaan melalui tiga proses utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Proses eksternalisasi terjadi ketika individu mengekspresikan pengalaman dan pemikirannya ke dalam bentuk yang bisa diamati oleh orang lain. Selanjutnya, objektivasi melibatkan penyusunan ekspresi tersebut ke dalam struktur atau fakta yang tampak obyektif dalam kehidupan sosial, dan internalisasi terjadi ketika individu mulai menerima dan mengasimilasi struktur tersebut sebagai bagian dari realitas mereka.(Puji, 2016)

Dalam konteks ini, interaksi antarindividu di masyarakat memainkan peran penting, karena proses-proses tersebut terjadi melalui komunikasi yang berlangsung secara alami melalui bahasa. Bahasa tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi medium yang memungkinkan terbentuknya makna bersama. Dengan demikian, realitas yang kita kenal merupakan hasil dari proses simultan di mana setiap individu secara aktif berkontribusi dalam membentuk dan mereproduksi struktur sosial melalui interaksi sehari-hari.

Dalam analisis framing berita, teori konstruksi sosial ini sangat relevan. Framing dapat dilihat sebagai proses di mana media membingkai atau menyusun narasi dengan cara tertentu, sehingga mempengaruhi cara masyarakat memahami suatu peristiwa. Proses framing pada dasarnya mencerminkan tahapan eksternalisasi (media menyampaikan informasi dengan sudut pandang tertentu), objektivasi (informasi tersebut disajikan sebagai fakta yang mapan), dan internalisasi (publik menerima dan mengasimilasi informasi itu sebagai realitas). Dengan memahami mekanisme konstruksi sosial, kita dapat melihat bagaimana pilihan kata, gaya penyampaian, dan narasi dalam pemberitaan turut membentuk persepsi publik terhadap isu-isu yang diberitakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing Zhangdong Pan dan Gerald M. Kosicki, konsep model analisis framing Pan dan Kosicki membagi struktural teks menjadi empat, , yaitu struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur retoris. Struktur sintaksis berkaitan dengan cara penyusunan berita, termasuk urutan peristiwa, penyampaian pernyataan, opini, kutipan, serta pengamatan terhadap suatu kejadian dalam rangkaian cerita berita. Hal ini dapat diamati dari elemen-elemen seperti judul yang digunakan, pemilihan lead, latar belakang informasi, serta sumber yang dikutip dalam

pemberitaan. Sementara itu, struktur skrip menyoroti strategi naratif yang digunakan oleh wartawan dalam menyajikan suatu peristiwa, menentukan alur cerita, dan membangun konteks pemberitaan. Struktur tematik berfokus pada cara wartawan mengungkapkan pandangannya terhadap suatu peristiwa melalui pemilihan kata, penyusunan kalimat, serta hubungan antarbagian dalam teks berita. Terakhir, struktur retoris mencermati penggunaan elemen bahasa seperti diksi, idiom, grafik, dan gambar yang berfungsi untuk menegaskan makna tertentu dalam berita. Keempat struktur ini secara bersama-sama membentuk cara suatu media mengemas informasi dan membingkai sebuah peristiwa dalam pemberitaannya.(Meilani, 2022)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah data penulisan berita mengenai Pemilu Presiden 2024 dimedia *kompas.com* dan *suara.com* periode 3-5 Desember 2023

NO	Hari/Tanggal	Judul Berita Kompas.com	Judul Berita Suara.com
1.	3 Desember 2023	Duduk Perkara Debat Pilpres 2024 : Debat Cawapres tetap ada tapi didampingi Capres	KPU Hapus Debat Cawapres, Ganjar Pranowo: Saya Siap Hadapi Skenario Apapun!
2.	4 Desember 2023	Ubah Format Debat Capres dan Cawapres, Kredibilitas KPU Dipertaruhkan	Saling Tuding, Tim Kampanye Soal Usulan Mekanisme Debat Pilpres, KPU: Biasa Dalam Demokrasi
3.	5 Desember 2023	Soal Polemik Debat Cawapres Bawaslu:Mau didampingi Capres apa Tidak,Terserah…	Perubahan Metode Debat Capres-Cawapres Disorot, Bawaslu Bakal Pastikan Langkah KPU

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Berita dari Kompas.com

Analisis Berita 1 : Duduk Perkara Pilpres 2024 : Debat Cawapres tetap ada tapi didampingi Capres (Mantalean & Sari, 2023)

Analisis Sintaksis

Pada bagian judul, berita ini menegaskan isu sentral bahwa debat cawapres tetap berlangsung, namun dengan perubahan format di mana calon presiden juga hadir mendampingi calon wakil presiden. Pada *lead* informasi disampaikan secara jelas bahwa KPU RI mengubah format debat tanpa menghilangkan peran cawapres, dan cawapres tetap akan menjadi aktor utama dalam debatnya. berita ini menguraikan respons dari berbagai pihak, termasuk kritik dari kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin yang keberatan dengan format baru tersebut, karena dianggap mengurangi fokus pada kapasitas cawapres. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, dan Komisioner KPU Idham Holik menjelaskan alasan perubahan format sebagai upaya untuk menunjukkan sinergi

antara capres dan cawapres kepada pemilih. Di sisi lain, kubu Muhaimin menyatakan penyesalannya atas perubahan tersebut. Latar berita ini terjadi dalam konteks persiapan Pilpres 2024, di mana debat menjadi salah satu instrumen penting bagi publik untuk menilai calon pemimpin. Rangkaian debat Pilpres ini diselenggarakan oleh KPU selama masa kampanye dari November 2023 hingga Februari 2024, dengan tema debat yang mencakup berbagai isu krusial, mulai dari hukum hingga teknologi.
Pada bagian penutup berita memberikan informasi mengenai jadwal dan tema debat yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Tidak ada kejelasan lebih lanjut tentang apakah format ini akan diterima sepenuhnya oleh seluruh pasangan capres-cawapres, namun KPU tetap akan melaksanakan debat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Analisis skrip

What : Format debat pilpres 2024

Who : Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

When : Pengumuman dilakukan pada 30 November 2023, dengan debat pertama dijadwalkan berlangsung pada 12 Desember 2023.

Where: Rencana pelaksanaan debat di Jakarta, termasuk di kantor KPU RI untuk debat pertama

Why: Format debat diubah untuk menampilkan kerja sama antara capres dan cawapres agar pemilih dapat melihat kekompakan mereka dalam debat

How: Cawapres akan tetap menjadi aktor utama dalam debat, tetapi akan didampingi oleh capres di panggung; format ini menyesuaikan UU Pemilu yang mengharuskan adanya tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres

Analisis Tematik

Berita menyoroti peran berbagai aktor politik seperti Hasyim Asy'ari (Ketua KPU), Idham Holik (Komisioner KPU), serta pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).Tema sentral dari berita ini adalah perubahan format debat Pilpres 2024 yang mengharuskan calon wakil presiden (cawapres) didampingi oleh calon presiden (capres) selama debat. Ini menunjukkan penekanan pada kolaborasi dan kerja sama antara pasangan calon yang dinilai penting untuk menunjukkan dinamika tim dalam konteks pemilu terdapat ketegangan yang muncul antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para calon. KPU berusaha mengklarifikasi bahwa debat cawapres tetap berlangsung meskipun dalam format baru, sementara kritik dari kubu calon menunjukkan adanya keraguan tentang efektivitas dan tujuan perubahan ini. Ini menciptakan dualitas antara informasi resmi yang disampaikan KPU dan respons dari calon yang berseberangan, menandakan adanya ketidakpuasan yang dapat mempengaruhi persepsi publik. narasi juga menyiratkan pentingnya transparansi dan penghormatan terhadap hak pemilih, di

mana calon seperti Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menekankan perlunya memperlihatkan peran cawapres dalam debat. Ini menciptakan sebuah tema mengenai legitimasi dan pengakuan terhadap aspirasi pemilih yang lebih luas.ada dimensi waktu yang signifikan dengan menyebutkan sejarah format debat sebelumnya dan harapan untuk perbaikan di masa depan. Hal ini menunjukkan keinginan untuk mempelajari dari pengalaman masa lalu sambil mengatasi tantangan baru dalam pemilihan yang akan datang. Dengan demikian, analisis unsur tematik dalam berita ini mengungkapkan dinamika kompleks dalam proses pemilihan, mencakup aspek kolaborasi, ketegangan, transparansi, dan harapan untuk perbaikan. Framing berita ini berpotensi memengaruhi pandangan publik terhadap calon dan proses demokrasi secara keseluruhan.

Analisis Retoris

Dalam berita ini, KPU berusaha untuk meyakinkan publik bahwa debat cawapres tidak dihilangkan, melainkan dipertahankan dengan format baru yang mencerminkan kerja sama tim. Pernyataan Hasyim Asy'ari, ketua KPU, bahwa "pemilih dapat melihat sejauh mana kerja sama masing-masing capres-cawapres dalam penampilan debat," menunjukkan upaya KPU untuk membangun kepercayaan dan mengedepankan nilai kolaborasi. Namun, perubahan format ini tidak lepas dari kritik. Sebagai contoh, Todung Mulya Lubis, perwakilan dari kubu Ganjar-Prabowo, menilai bahwa format baru ini berpotensi merugikan pemilih dengan mengekang kemampuan mereka untuk memahami kapasitas cawapres secara individual. Di sisi lain, Anies Baswedan menekankan pentingnya menghormati hak pemilih dengan memperlihatkan cawapres secara jelas. Melalui kutipan-kutipan ini, berita menyoroti ketegangan antara tujuan KPU dalam menciptakan debat yang lebih informatif dan kekhawatiran dari para kandidat mengenai dampak format baru terhadap pemilih. Dengan cara ini, analisis retoris menunjukkan bahwa berita tersebut tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menggambarkan dinamika politik yang lebih luas dan kompleks menjelang pemilu.

Analisis berita 2 : Ubah Format Debat Capres dan Cawapres, Kredibilitas KPU Dipertaruhkan (Farisa, 2023)

Analisis sintaksis

Berita mengangkat isu kredibilitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dipertaruhkan akibat perubahan format debat capres dan cawapres untuk Pemilu Presiden 2024, dengan kutipan dari Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, yang menyatakan bahwa keputusan KPU mengubah format debat ini berpotensi merugikan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu dan menyajikan penjelasan tentang format baru yang diterapkan KPU, di mana pasangan capres-cawapres akan hadir bersama dalam lima kali debat, berbeda dari format sebelumnya yang memisahkan debat antara capres dan cawapres. Halili berargumen bahwa perubahan ini adalah kemunduran yang membuat publik kehilangan kesempatan untuk mengenal masing-masing kandidat secara mendalam, serta memunculkan kecurigaan akan intervensi politik dalam penyelenggaraan pemilu.berita ini menggambarkan konteks lebih luas mengenai potensi dampak dari keputusan KPU terhadap persepsi masyarakat, di mana masyarakat bisa merasa terasing dari proses demokrasi jika tidak diberi kesempatan untuk mengetahui lebih jauh tentang figur calon pemimpin. Di sisi lain, KPU berupaya menjelaskan bahwa perubahan ini bertujuan untuk

menunjukkan kerja sama antara capres dan cawapres, meskipun tetap terdapat keraguan dari public dengan menggarisbawahi bahwa langkah KPU bisa menciptakan spekulasi di kalangan masyarakat, di mana kepercayaan terhadap institusi penyelenggara pemilu semakin dipertaruhkan, dan pentingnya untuk mempertimbangkan sentimen publik sebelum melakukan perubahan yang bisa berdampak signifikan terhadap pemilu mendatang.

Analisis skrip

Who : Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan para pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024 dan Direktur Eksekutif Setara Institute, Halili Hasan, sebagai pengamat yang mengkritik keputusan KPU.

What :- KPU mengubah format debat Pilpres 2024 di mana capres dan cawapres akan selalu hadir bersamaan selama lima kali debat.
- Halili Hasan mengkritik perubahan format tersebut sebagai kemunduran dalam proses demokrasi dan merugikan publik yang tidak dapat melihat figur capres dan cawapres secara otentik.

When : Perubahan format ini diungkapkan oleh KPU pada akhir November 2023 dan Kritik terhadap format baru ini disampaikan oleh Halili Hasan pada Senin, 4 Desember 2023

Where : Perubahan format debat diumumkan oleh KPU di Jakarta, dan kritik terhadapnya dilontarkan secara tertulis oleh Halili kepada media, termasuk *kompas.com.*

Why : - KPU mengubah format debat untuk menonjolkan kerja sama antara capres dan cawapres dalam debat, dengan harapan pemilih bisa melihat sinergi antara keduanya.
-Halili Hasan menilai perubahan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu dan memberi kesan adanya intervensi dari kekuatan politik eksternal.

How : Menurut KPU, perubahan format dilakukan untuk memperlihatkan kerja sama antara capres dan cawapres dalam satu tim. Namun, Halili menilai bahwa dengan perubahan ini, publik dirugikan karena tidak mendapatkan kesempatan untuk menilai kemampuan capres dan cawapres secara individu.

.

Analisis Tematik

Tema utama yang diangkat adalah kekhawatiran terhadap kualitas demokrasi dan transparansi pemilu. Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institute, menilai bahwa perubahan format debat di mana calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) selalu tampil bersamaan, merugikan publik karena mereka tidak mendapat kesempatan untuk menilai secara mendalam figur otentik dari masing-masing kandidat. Hal ini dianggap sebagai kemunduran dalam proses demokrasi. Tema ketidakpercayaan publik terhadap keputusan KPU juga mencuat, di mana perubahan ini memunculkan kecurigaan adanya intervensi politik dari kekuatan eksternal yang

mungkin menguntungkan salah satu kandidat. Dalam konteks ini, perubahan format dianggap dapat merusak kredibilitas KPU sebagai penyelenggara pemilu, dan dinilai sebagai ancaman terhadap integritas demokrasi yang sudah semakin tergerus.

Analisis Retoris

Analisis retoris yang menyoroti perdebatan tentang keputusan KPU mengubah format debat Pilpres 2024. Menurut Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institute, perubahan ini merusak kredibilitas KPU dan menjadi pertaruhan terhadap demokrasi di Indonesia. Halili mengemukakan bahwa format baru, di mana capres dan cawapres selalu tampil bersama dalam setiap debat, merupakan kemunduran dibandingkan Pilpres 2019, di mana debat digelar secara terpisah untuk capres dan cawapres. Halili mengkritik format ini karena dianggap merugikan pemilih dengan membatasi kemampuan mereka untuk menilai masing-masing kandidat secara individu, sehingga mereka tidak mendapatkan wawasan mendalam tentang kemampuan otentik capres dan cawapres. Retorika Halili memperkuat argumennya dengan menyatakan bahwa tindakan KPU memicu kecurigaan publik tentang adanya intervensi politik yang menguntungkan salah satu pasangan calon, terutama karena dinamika politik yang sedang berlangsung. Dengan menggunakan kata-kata seperti "kemunduran" dan "kecurigaan yang masuk akal," Halili menyoroti kekhawatiran bahwa keputusan KPU bukan hanya soal teknis pemilu, melainkan juga mencerminkan ancaman terhadap prinsip demokrasi. Hal ini didukung oleh kerangka hukum yang ada, di mana KPU tetap berpegang pada UU Pemilu untuk membenarkan format baru. Namun, di sisi lain, pernyataan Ketua KPU Hasyim Asy'ari berupaya meyakinkan publik bahwa tujuan perubahan format adalah untuk menampilkan kolaborasi antara capres dan cawapres. Ini menunjukkan adanya kontras retoris antara pandangan kritis terhadap KPU dan pembelaan KPU yang berfokus pada *teamwork* kandidat, menciptakan diskusi terbuka tentang dampak perubahan ini terhadap kualitas pemilu.

Analisis berita 3 : Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau didampingi Capres apa Tidak, Terserah… (Setuningsih & Ulya, 2023)

Analisis Sintaksis

Berita ini secara jelas menggambarkan inti dari polemik terkait format debat cawapres, yang menjadi fleksibel menurut pandangan Bawaslu.serta menyampaikan pernyataan dari Bawaslu yang menyerahkan sepenuhnya format debat capres-cawapres kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selama tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penjelasan ini memberikan gambaran awal tentang inti masalah, yakni kebebasan format debat selama sesuai hukum mengangkat konteks mengenai aturan debat yang termuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, di mana debat hanya diatur mengenai jumlah pelaksanaannya (tiga kali debat capres dan dua kali debat cawapres), tanpa aturan spesifik mengenai format pelaksanaannya. Bawaslu, melalui Ketua Rahmat Bagja, menegaskan bahwa tidak ada aturan ketat mengenai apakah capres harus mendampingi cawapres dalam debat, dan sepenuhnya diserahkan kepada KPU dan paslon. Bagja menyebutkan bahwa Bawaslu sudah mengingatkan KPU melalui surat resmi agar mematuhi peraturan perundang-undangan untuk menghindari pelanggaran pemilu. Ia juga menyoroti pentingnya KPU memberikan penjelasan kepada publik mengenai format debat agar isu-isu negatif tidak berkembang mengenai perbedaan format debat pada Pilpres 2019 dan Pilpres 2024 juga disebutkan, di mana dalam Pemilu 2024, cawapres akan

mendampingi capres saat debat, begitu pula sebaliknya. Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa hal ini bertujuan untuk menunjukkan kepada publik kekompakan tim antara capres dan cawapresberita ini memperjelas bahwa format debat cawapres dan capres tetap di bawah kewenangan KPU dengan catatan tetap sesuai dengan undang-undang, dan perubahan format ini dilakukan demi memberikan gambaran lebih jelas kepada pemilih mengenai sinergi antara capres dan cawapres dalam bekerja sama.

Analisis Skrip

Who : -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu): Lembaga pengawas pemilu yang diwakili oleh Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja.
-Komisi Pemilihan Umum (KPU): Lembaga penyelenggara pemilu yang diberi kewenangan untuk mengatur format debat capres-cawapres, yang diwakili oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari.

What :Polemik terkait format debat calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilu 2024. Bawaslu menegaskan bahwa KPU memiliki kewenangan penuh untuk mengatur format debat selama tidak melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Terdapat perubahan format debat dari pemilu sebelumnya, termasuk opsi apakah cawapres didampingi oleh calon presiden (capres) atau tidak.

Where :Pernyataan Bawaslu disampaikan di Hotel Savoy Homann, Bandung, Jawa Barat, pada tanggal 5 Desember 2023.

When : Pernyataan Bawaslu tentang format debat disampaikan pada 5 Desember 2023.

Why : Bawaslu mengeluarkan pernyataan ini untuk mengingatkan KPU agar tetap mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, serta memastikan format debat tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pernyataan ini juga bertujuan untuk mencegah isu-isu yang dapat menimbulkan kebingungan publik, seperti rumor bahwa debat cawapres dihilangkan.

How: Bawaslu menyarankan KPU untuk memastikan publik paham tentang aturan debatb capres-cawapres dengan memberikan penjelasan yang jelas dan transparan mengenai format debat yang diubah dari pemilu sebelumnya. KPU diberi kebebasan untuk menentukan format debat selama sesuai dengan undang-undang, namun diimbau agar format yang diusulkan menjunjung prinsip keterbukaan dan transparansi.

Analisis Tematik

Berita mengenai polemik debat calon wakil presiden (cawapres) mengangkat tema sentral mengenai fleksibilitas format debat yang diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pasangan calon, dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berperan sebagai pengingat agar aturan yang ada tetap dipatuhi. Dalam hal ini, tematik yang paling dominan adalah seputar perdebatan mengenai bagaimana aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dipraktikkan terkait debat capres-cawapres. Meskipun undang-undang tersebut

tidak mengatur secara rinci mengenai format debat, Bawaslu menegaskan bahwa format debat apapun yang diambil harus tetap dalam kerangka hukum yang berlaku, tanpa menghilangkan esensi debat itu sendiri. Bawaslu juga menekankan pentingnya KPU menjelaskan kepada publik mengenai format debat untuk menghindari salah tafsir atau isu negatif yang bisa merusak proses pemilu. Di sisi lain, KPU memberikan alasan bahwa perubahan format debat pada Pilpres 2024 bertujuan untuk menampilkan kerja sama antara capres dan cawapres di depan publik, sehingga masyarakat bisa menilai kekompakan pasangan calon. Tema ini menggambarkan dinamika antara fleksibilitas aturan dan kejelasan komunikasi publik untuk menjaga transparansi dan kepercayaan pemilih dalam proses demokrasi.

Analisis Retoris

Analisis retoris pada berita "Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu": Mau didampingi Capres apa Tidak, Terserah…" menunjukkan penggunaan struktur kalimat yang lugas dan langsung, terutama dalam pernyataan dari Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja. Kalimat-kalimatnya cenderung menggunakan pola deklaratif dengan subjek di awal diikuti oleh predikat yang jelas, misalnya, "Bawaslu menyerahkan seluruhnya format debat...". Ini menegaskan sikap Bawaslu yang pasif dan menyerahkan keputusan format debat sepenuhnya kepada KPU, selama sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Penggunaan kata-kata seperti "monggo, terserah" menunjukkan fleksibilitas dalam aturan dan memberikan ruang kepada KPU untuk mengambil keputusan. Kalimat-kalimat ini berfungsi untuk menekankan bahwa tidak ada aturan yang ketat mengenai pendampingan capres atau cawapres selama debat. Struktur ini mengandung unsur imperatif yang lembut, seperti "KPU stated saja" dan "Silakan membuat format debat sebaik-baiknya", yang menunjukkan bahwa Bawaslu tidak memberikan perintah, melainkan imbauan.

Bagja juga sering menggunakan struktur kalimat sederhana yang langsung, seperti "Kami mengingatkan saja kepada KPU agar kembali kepada Undang-Undang", yang memperlihatkan maksud dari Bawaslu untuk menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum, tanpa memperumit pesannya dengan anak kalimat atau subordinasi yang rumit.

Secara keseluruhan, sintaksis dalam berita ini menonjolkan kalimat-kalimat yang sederhana, ringkas, dan komunikatif, yang menggambarkan pesan yang jelas dan tidak ambigu terkait tanggung jawab KPU dalam pengaturan format debat, sementara Bawaslu hanya berperan sebagai pengingat.

Analisis Framing dari *Kompas.com*

Berita 1, pemberitaan "Duduk Perkara Pilpres 2024: Debat Cawapres tetap ada tapi didampingi Capres" menekankan konflik dua narasi: di satu sisi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) berusaha menampilkan kolaborasi antara capres dan cawapres dengan format debat baru, namun sisi lain berita ini juga menyoroti protes dari kubu calon yang merasa format ini mengurangi penilaian terhadap cawapres secara individu. Dalam framing ini, tersirat ketegangan antara upaya KPU untuk menunjukkan sinergi pasangan calon dan ketidaknyamanan dari pihak-pihak yang merasa bahwa format ini tidak memberikan peluang yang adil bagi cawapres untuk menonjol. menekankan perubahan format debat yang menghadirkan kolaborasi antara capres dan cawapres. Narasi dalam berita ini menyajikan fakta bahwa KPU mengubah format debat untuk menunjukkan sinergi antar calon, namun secara simultan menyiratkan dualitas dengan adanya

kritik dari beberapa kubu yang khawatir bahwa penekanan kerja sama tersebut justru mengurangi penilaian secara individual terhadap cawapres. Dengan demikian, framing berita ini tidak hanya menyoroti upaya KPU dalam membangun legitimasi dan transparansi, tetapi juga menggambarkan ketegangan dan ketidakpastian yang mengemuka di kalangan politisi dan pemilih.

Berita 2, "Ubah Format Debat Capres dan Cawapres, Kredibilitas KPU Dipertaruhkan", framing yang diterapkan lebih berfokus pada kekhawatiran terhadap kredibilitas KPU. Pada framing lebih berfokus pada dampak perubahan format debat terhadap kredibilitas KPU. Kritik yang disampaikan oleh Halili Hasan, Direktur Eksekutif Setara Institute, menunjukkan kekhawatiran bahwa perubahan ini merupakan kemunduran yang akan menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas KPU dan memperkuat keraguan terkait intervensi politik. Framing ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap keputusan KPU dengan menonjolkan ketidaksetujuan sebagian kalangan yang mempermasalahkan dampak jangka panjang terhadap kualitas pemilu dan proses demokrasi. Pemberitaan ini menyoroti keputusan KPU untuk menyelenggarakan debat dengan kehadiran capres dan cawapres secara bersamaan di setiap sesi, yang dipertanyakan oleh pengamat seperti Halili Hasan. Kritik yang disampaikan menggunakan retorika kuat dengan kata-kata seperti "kemunduran" dan "kecurigaan" yang mengindikasikan bahwa perubahan format tersebut berpotensi merugikan pemilih dengan membatasi penilaian terhadap kemampuan individu para kandidat dan menimbulkan kesan adanya intervensi politik dalam proses demokrasi.

Berita 3, "Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau didampingi Capres apa Tidak, Terserah…", berita ketiga lebih bersifat mendalam pada fleksibilitas aturan debat yang diklarifikasi oleh Bawaslu. Dalam framing ini, Bawaslu mengingatkan KPU untuk mematuhi UU Pemilu dengan memberikan penjelasan mengenai alasan perubahan format debat. Narasi ini menonjolkan transparansi dan kepatuhan terhadap hukum, dengan Bawaslu berusaha menenangkan publik mengenai kebebasan yang diberikan di dalam kerangka hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, peran ideologi perusahaan, seperti yang terlihat dalam berita-berita ini, terlihat memengaruhi framing yang digunakan, baik dalam mempertahankan objektivitas, menyoroti instabilitas, maupun memastikan kepatuhan hukum semuanya berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap Pilpres 2024.menghadirkan framing yang menekankan fleksibilitas aturan dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam berita ini, Bawaslu menyerahkan keputusan mengenai format debat kepada KPU, asalkan sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, sambil mengimbau agar transparansi dan komunikasi jelas tetap dijaga untuk menghindari salah tafsir. Secara keseluruhan, meskipun Kompas.com berupaya menyajikan narasi yang seimbang, orientasi editorial yang dipengaruhi oleh ideologi perusahaan turut menentukan penekanan isu mulai dari kolaborasi, keraguan atas kredibilitas KPU, hingga kepatuhan terhadap regulasi yang pada akhirnya membentuk persepsi publik terhadap integritas proses demokrasi dan prospek Pilpres 2024.

Pengemasan framing dari media *kompas.com* ini lebih objektif . *kompas.com* menerapkan pendekatan yang lebih institusional dan formal. Berita yang disampaikan lebih menitikberatkan pada aspek prosedural dan regulasi, dengan mengacu pada pernyataan dari lembaga terkait, seperti KPU dan Bawaslu, sebagai sumber utama. *kompas.com* berupaya memberikan berupaya menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai alasan di balik perubahan format debat, menekankan pada tujuan penyelenggara dalam menciptakan sinergi antara pasangan capres-cawapres serta bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada kualitas debat secara

keseluruhan. Framing yang digunakan bersifat netral,. Alih-alih menghadirkan narasi yang bersifat polemik, *kompas.com* lebih mengedepankan aspek demokrasi, khususnya dalam membahas dampak perubahan ini terhadap legitimasi pemilu dalam jangka panjang. Dengan fokus utama pada proses demokrasi dan implikasinya terhadap legitimasi pemilu, alih-alih menggiring opini publik ke arah tertentu.*kompas.com* lebih menekankan analisis mendalam mengenai dampak kebijakan ini dalam konteks keberlangsungan pemilu yang kredibel, tanpa memberikan penilaian negatif secara eksplisit terhadap pihak-pihak yang terlibat. Dengan pendekatan tersebut, pemberitaan *kompas.com* cenderung bersifat deskriptif dan analitis, membangun pemahaman bagi pembaca dengan menyajikan berbagai sudut pandang yang relevan tanpa memperlihatkan kecenderungan politis yang dominan.

B. Analisis Berita dari Suara.com

Analisis berita 1 : KPU Hapus Debat Cawapres, Ganjar Pranowo: Saya Siap Hadapi Skenario Apapun! (Lesmana, 2023)

Analisis Sintaksis

Judul berita ini menarik perhatian dengan menonjolkan dua hal penting: keputusan KPU menghapus debat cawapres dan pernyataan Ganjar Pranowo yang siap menghadapi skenario apapun. Judul ini menggabungkan elemen kebijakan dan respons politis, menunjukkan ketangguhan calon presiden Ganjar di tengah perubahan format debat.

Berita ini langsung mengarahkan pembaca pada inti pernyataan Ganjar Pranowo yang menegaskan kesiapan dirinya dalam menghadapi debat, apapun formatnya.

Pada awal berita memberikan gambaran ringkas mengenai posisi Ganjar terkait keputusan KPU, menciptakan kesan bahwa Ganjar tetap tenang dan siap menghadapi berbagai skenario, menyoroti sikap optimis dan fleksibilitasnya sebagai calon pemimpin. berita ini mencakup rangkaian keputusan KPU menghapus debat cawapres serta perubahan format debat untuk Pilpres 2024 dengan memberikan konteks bagi pembaca terkait perubahan aturan, menyoroti jadwal dan tema debat yang sudah ditentukan KPU.

Perubahan ini menjadi bagian penting dari narasi politik yang sedang berlangsung, karena memengaruhi strategi kampanye para kandidat. berita ini adalah dinamika Pilpres 2024, khususnya terkait keputusan KPU tentang format debat. Latar tempat yang disebutkan adalah KPU RI, yang berfungsi sebagai otoritas yang menentukan aturan debat. Selain itu, latar waktu mencakup tanggal-tanggal penting untuk debat capres dan cawapres, dengan tema debat yang mengacu pada visi nasional dan rencana pembangunan jangka panjang. Hal ini memberikan gambaran besar kepada pembaca mengenai kompleksitas perencanaan debat dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan tema-tema penting yang akan diangkat selama proses Pilpres.

Dengan demikian, analisis sintaksis ini menunjukkan bagaimana berita mengalir secara efektif dari judul hingga latar, memberikan informasi yang lengkap dan terstruktur, sambil menyoroti

tanggapan calon presiden Ganjar Pranowo terhadap perubahan aturan debat yang ditetapkan oleh KPU.

Analisis Skrip

Who : - Ganjar Pranowo, calon presiden (capres) nomor urut tiga pada Pilpres 2024.
-Komisi Pemilihan Umum (KPU)

What: Berita ini menginformasikan bahwa KPU menghapus debat khusus antar cawapres dalam Pilpres 2024. Ganjar Pranowo menyatakan dirinya siap menghadapi skenario apa pun yang terkait dengan perubahan format debat tersebut.

When : Keputusan KPU tentang penghapusan debat cawapres diumumkan pada Desember 2023, dan debat Pilpres 2024 akan digelar sebanyak lima kali, dimulai pada 12 Desember 2023 hingga 4 Februari 2024.

Where : Debat calon presiden dan calon wakil presiden akan diselenggarakan oleh KPU dan debat pertama akan berlangsung di Kantor KPU pada 12 Desember 2023.

Why : KPU memutuskan mengubah format debat dengan menghapus debat khusus cawapres untuk memperlihatkan sinergi dan kerja sama antara capres dan cawapres dalam satu debat bersama. Ganjar Pranowo menegaskan kesiapan dirinya karena perubahan ini tidak menghalangi persiapannya untuk menghadapi debat.

How : Ganjar menyatakan kesiapan mental dan strateginya untuk berpartisipasi dalam debat, baik dengan atau tanpa debat khusus cawapres. KPU, sementara itu, akan tetap melaksanakan lima debat dengan tema yang telah ditentukan, sesuai peraturan.

Analisis ini menunjukkan bagaimana Ganjar mengedepankan fleksibilitas dan kesiapan menghadapi setiap format debat yang ditentukan oleh KPU, serta peran KPU dalam mengatur jalannya debat demi memastikan pemilu yang berkualitas.

Analisis Tematik

Analisis tematik berita menunjukkan beberapa tema kunci yang relevan dalam konteks politik dan pemilihan presiden 2024. Pertama, mengenai kesiapan politik menjadi sentral dalam pernyataan Ganjar Pranowo. Klaim bahwa ia siap menghadapi “skenario apa pun” mencerminkan kesiapan seorang capres dalam menghadapi perubahan atau tantangan yang mungkin muncul, termasuk penghapusan debat khusus cawapres oleh KPU. Ini juga menunjukkan ketenangan dan adaptabilitas seorang kandidat dalam situasi yang berubah-ubah, yang dapat memberikan rasa percaya kepada pemilih bahwa dia mampu mengatasi kondisi yang tidak terduga.

Kedua, perubahan format menyoroti kebijakan baru KPU yang menghapus debat cawapres secara khusus, yang sebelumnya merupakan bagian dari Pilpres. Perubahan ini menekankan pendekatan baru untuk Pilpres 2024, di mana capres dan cawapres akan tampil bersama dalam semua debat, tanpa ada porsi khusus untuk debat antar-wakil. Tema ini menyiratkan pergeseran strategi

kampanye dan penampilan publik calon yang difokuskan pada kolaborasi tim capres-cawapres.

Ketiga, tema keterbukaan informasi melalui penyampaian jadwal dan tema debat oleh KPU juga relevan. KPU menjelaskan secara rinci topik yang akan dibahas dalam setiap debat, mulai dari hukum, HAM, ekonomi, hingga teknologi informasi. Ini menunjukkan transparansi dan keterbukaan yang diharapkan KPU untuk memfasilitasi debat yang konstruktif dan informatif bagi masyarakat. Selain itu, pernyataan Ganjar yang "siap untuk apa pun" selaras dengan tema ini, di mana masyarakat dihadapkan pada format debat baru yang bertujuan memberi gambaran lebih luas tentang kapabilitas tim capres-cawapres. Secara keseluruhan, berita ini menampilkan tema-tema seputar kesiapan kandidat, perubahan format, dan keterbukaan informasi dalam rangkaian debat Pilpres 2024 yang menunjukkan dinamika politik yang terus berkembang di Indonesia.

Analisis Retoris

Analisis framing dengan unsur retoris dalam berita "KPU Hapus Debat Cawapres, Ganjar Pranowo: Saya Siap Hadapi Skenario Apa Pun!" menyoroti bagaimana posisi Ganjar Pranowo dalam menghadapi keputusan KPU, serta bagaimana narasi tersebut disusun untuk menciptakan kesan tertentu.
Framing berita ini menunjukkan bahwa keputusan KPU menghapus debat khusus cawapres tidak dianggap sebagai hambatan oleh Ganjar Pranowo. Dalam pernyataannya, Ganjar menggunakan unsur etos untuk membangun citra sebagai pemimpin yang fleksibel dan siap menghadapi tantangan apa pun. Dengan menekankan "siap untuk skenario apa pun," Ganjar memposisikan dirinya sebagai capres yang tangguh dan memiliki persiapan matang.
Ini menunjukkan bahwa dirinya berusaha mengedepankan profesionalisme dan kesiapan yang tidak tergoyahkan oleh perubahan aturan, yang memberikan kredibilitas pada kemampuannya memimpin. Unsur pathos digunakan dalam cara pernyataannya memberikan keyakinan kepada audiens, terutama pendukungnya, bahwa apa pun format debat yang ditetapkan, dia akan tampil maksimal. Dengan menyatakan bahwa "ada atau tidaknya debat antar-cawapres" dia tetap siap, Ganjar berusaha mengurangi kekhawatiran publik terkait hilangnya forum penting bagi calon wakil presiden, sekaligus menenangkan simpatisannya.
Sementara itu, penggunaan logos terlihat dalam pemaparan fakta mengenai keputusan KPU. Keputusan tersebut dipaparkan secara logis, dengan menguraikan jadwal dan tema debat, sehingga pembaca memiliki gambaran jelas tentang konteks perubahan yang dilakukan KPU, menambah kejelasan informasi yang dihadirkan. Narasi ini memperkuat argumen bahwa keputusan KPU masih berpegang pada regulasi dan prosedur yang telah ditetapkan.
Secara keseluruhan, framing berita ini menggunakan retorika untuk membangun narasi Ganjar sebagai calon yang selalu siap, memperkuat posisinya sebagai kandidat yang tangguh dalam berbagai situasi, sambil juga memperjelas keputusan KPU sebagai bagian dari kerangka aturan resmi.

Analisis berita 2 : Saling Tuding, Tim Kampanye Soal Usulan Mekanisme Debat Pilpres, KPU: Biasa Dalam Demokrasi (Iswinarno & Irianto, 2023)

Analisis Sintaksis

Judul berita ini mengandung dua unsur penting: "Saling Tuding" dan "Usulan Mekanisme Debat

Pilpres." Frasa "saling tuding" menyoroti konflik antara tim kampanye, menciptakan kesan ketegangan dan perselisihan dalam konteks politik. Sementara itu, "usulan mekanisme debat Pilpres" menunjukkan fokus utama berita ini, yakni mengenai perubahan yang diajukan dalam format debat, yang sangat relevan dengan dinamika pemilu. Awalan berita ini langsung mengarahkan perhatian pembaca kepada tanggapan KPU mengenai perdebatan yang terjadi di antara tim kampanye.

Pernyataan anggota KPU, Idham Holik, yang menilai perdebatan tersebut sebagai hal yang biasa dalam demokrasi, memberikan konteks dan menegaskan posisi KPU sebagai lembaga netral yang mengatur pemilu. Dengan menyatakan bahwa perdebatan adalah hal yang wajar, lead ini membantu meredakan ketegangan yang mungkin muncul dari saling tuding antara tim kampanye. berita ini mencakup rangkaian pernyataan dari berbagai pihak terkait usulan mekanisme debat. KPU berkomitmen untuk melakukan koordinasi dengan tim kampanye, sementara anggota tim kampanye dari pasangan capres dan cawapres berbeda memberikan pandangan dan bantahan mengenai usulan penghapusan debat cawapres. Ini menunjukkan dinamika komunikasi yang terjadi dalam proses politik, di mana setiap pihak berusaha mempertahankan posisi mereka dan saling mengajukan argumen. Latar berita ini berfokus pada konteks pemilihan presiden 2024 di Indonesia, khususnya mengenai debat yang akan diadakan. Latar tempat mencakup Kantor KPU di Jakarta Pusat, yang merupakan pusat pengambilan keputusan terkait pemilu.

Latar waktu menyebutkan beberapa tanggal penting, termasuk jadwal debat yang telah ditetapkan, serta beberapa pernyataan yang terjadi dalam rentang waktu sebelum berita dilaporkan. Hal ini memberikan gambaran jelas mengenai peristiwa yang sedang berlangsung dan kepentingan yang terlibat dalam proses debat pemilu. Secara keseluruhan, analisis sintaksis ini menunjukkan bagaimana berita dibangun secara terstruktur, dari judul yang menarik perhatian hingga penyampaian informasi yang jelas mengenai dinamika dan konflik yang ada dalam persiapan debat pemilu. Berita ini berhasil menyajikan perspektif dari berbagai pihak dan mengedepankan pentingnya komunikasi dan musyawarah dalam demokrasi.

Analisis Skrip

Who : KPU (Komisi Pemilihan Umum)yang diwakili oleh anggota Idham Holik, serta para anggota tim kampanye dari pasangan capres-cawapres yang terlibat dalam perdebatan ini. Di antaranya adalah Grace Natalie dari tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, serta Nihayatul Wafiroh dari tim AMIN (Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar).

What : Berita ini membahas perdebatan antartim kampanye capres dan cawapres mengenai usulan mekanisme debat. KPU menanggapi perdebatan tersebut dengan menyatakan bahwa perdebatan adalah hal yang biasa dalam demokrasi, serta menekankan pentingnya musyawarah.

When :Perdebatan ini berlangsung pada hari Senin, 4 Desember 2023, saat anggota KPU memberikan tanggapan. Selain itu, ada rujukan ke kegiatan sebelumnya, seperti *focus group discussion* (FGD) pada 29 November 2023.

Where :- Perdebatan dan tanggapan ini terjadi di Kantor KPU yang terletak di Jakarta Pusat. Selain itu, lokasi debat yang akan datang juga dijadwalkan berlangsung di Jakarta.

Why :- Perdebatan ini muncul karena adanya usulan untuk menghapus debat khusus cawapres, yang diusulkan oleh tim dari pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. KPU ingin memastikan bahwa proses demokrasi berjalan lancar dan dapat dikomunikasikan dengan baik antar tim kampanye, dengan menggunakan mekanisme musyawarah.

How : KPU akan melakukan koordinasi dengan tim kampanye ketiga pasangan calon untuk membahas mekanisme debat, dan menjelaskan bahwa dalam setiap debat, baik capres maupun cawapres akan hadir. KPU juga menetapkan tema-tema untuk lima kali debat yang akan digelar, serta menjelaskan proporsi bicara masing-masing calon selama debat.

Melalui analisis ini, kita dapat melihat bahwa berita tersebut tidak hanya menginformasikan tentang mekanisme debat tetapi juga menunjukkan dinamika politik yang terjadi di antara tim kampanye, serta bagaimana KPU berupaya untuk menjaga transparansi dan komunikasi dalam proses pemilihan umum.

Analisis Tematik

Berita ini berfokus pada konflik antara tim kampanye pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mengenai mekanisme debat yang diusulkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tema utama mencakup bagaimana pandangan berbeda di antara tim kampanye berpengaruh terhadap proses debat yang akan datang, serta tanggapan KPU yang menekankan pentingnya musyawarah dalam demokrasi. Persepsi terhadap Perdebatan: KPU, melalui pernyataan anggota Idham Holik, berusaha untuk menekankan bahwa perdebatan dan konflik di antara tim kampanye adalah hal yang wajar dalam konteks demokrasi. Pernyataan ini menyiratkan bahwa KPU menganggap dinamika politik sebagai bagian integral dari proses pemilu yang sehat, menunjukkan sikap positif terhadap perdebatan dan mendorong kolaborasi melalui musyawarah.
Saling Tuduh dalam Kampanye: Ada elemen saling tuding di antara tim kampanye yang ditunjukkan melalui pernyataan Grace Natalie dan Nihayatul Wafiroh. Grace menyebutkan bahwa penghapusan debat cawapres diusulkan oleh tim Anies Baswedan, sedangkan Nihayatul menegaskan bahwa mereka hanya meminta capres-cawapres hadir bersama di setiap debat.
Framing ini mengindikasikan ketegangan dan ketidakpercayaan di antara tim kampanye, yang bisa menciptakan persepsi negatif terhadap integritas proses pemilu. Penekanan pada Proses Debat: Selain konflik tersebut, berita ini juga menjelaskan detail mengenai format dan tema debat yang akan datang, termasuk penjelasan dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Ini memberikan informasi penting tentang bagaimana debat akan berlangsung dan menunjukkan bahwa KPU berusaha menjaga agar proses debat tetap terstruktur dan informatif, meskipun ada ketegangan yang terjadi di antara tim kampanye. Demokrasi Pancasila: KPU mengaitkan konteks perdebatan dengan prinsip Demokrasi Pancasila, yang menekankan musyawarah dan keterbukaan. Ini memberikan framing positif terhadap perdebatan dan konflik yang ada, serta mengajak semua pihak untuk terlibat dalam dialog konstruktif daripada saling menuduh.
Framing ini berusaha membangun citra KPU sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam membangun iklim demokrasi yang sehat. Melalui analisis ini, kita dapat melihat bagaimana tema dan framing dalam berita ini tidak hanya menggambarkan situasi terkini terkait debat Pilpres, tetapi juga mencerminkan dinamika politik dan nilai-nilai demokrasi yang lebih luas dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

Analisis Retoris

Analisis unsur retoris yang terkandung dalam berita ini: Pernyataan KPU sebagai Pihak Penengah: KPU, melalui pernyataan anggota Idham Holik, mengatur framing yang menyatakan bahwa perdebatan antar tim kampanye adalah hal yang biasa dalam demokrasi. Dengan menggunakan ungkapan "hal biasa," KPU berusaha meredakan ketegangan dan menempatkan diri sebagai mediator yang mendukung komunikasi terbuka dalam konteks demokrasi Pancasila. Ini memperkuat posisi KPU sebagai institusi yang tidak memihak dan mengutamakan musyawarah. Dinamika Antartim Kampanye : Berita ini mencerminkan saling tuding antara tim kampanye dengan menyebutkan siapa yang mengusulkan penghapusan debat cawapres. Dengan menyebutkan nama Grace Natalie dari TKN Prabowo Subianto dan Nihayatul Wafiroh dari tim AMIN, berita ini memperjelas adanya perdebatan dan ketidakpahaman antara tim yang berbeda. Framing ini berfungsi untuk menarik perhatian pembaca pada pertikaian internal dan strategi yang dimainkan oleh masing-masing tim.
Penegasan Kembali oleh KPU: Melalui penjelasan KPU tentang proporsi bicara antara capres dan cawapres, narasi mengarah pada klarifikasi bahwa meskipun ada perubahan format, semua pasangan tetap hadir. Dengan menekankan pada keterlibatan semua pasangan calon dalam debat, KPU membentuk citra bahwa proses debat tetap akan berlangsung dengan adil dan transparan, serta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Penggunaan istilah demokrasi Pancasila: KPU menggunakan istilah "Demokrasi Pancasila" untuk menekankan nilai-nilai yang harus dijunjung dalam perdebatan ini. Dengan merujuk pada prinsip-prinsip Pancasila, framing ini bertujuan untuk menghubungkan proses demokrasi dengan konteks kultural Indonesia, dan mengingatkan semua pihak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah. Detail Tema Debat Menyediakan informasi tentang tema debat yang akan datang juga berfungsi sebagai strategi framing untuk menunjukkan kesiapan dan struktur yang jelas dalam proses pemilihan. Dengan merincikan tema-tema debat, KPU memberi sinyal bahwa meskipun ada ketegangan antar tim, proses pemilihan akan berjalan dengan sistematis dan terencana. Secara keseluruhan, framing dalam berita ini menciptakan narasi tentang dinamika pemilihan yang diwarnai oleh ketegangan antar tim kampanye, namun tetap dikelola dalam kerangka demokrasi yang teratur dan terstruktur. KPU berperan sebagai penengah yang menjaga agar komunikasi tetap berjalan dan mengedepankan prinsip musyawarah, meskipun ada perbedaan pendapat yang mencolok.

Analisis berita 3 : Perubahan Metode Debat Capres-Cawapres Disorot, Bawaslu Bakal Pastikan Langkah KPU (Sari & Irianto, 2023)

Analisis Sintaksis

Judul berita ini mengedepankan isu utama, yaitu perubahan metode debat capres-cawapres yang sedang menjadi sorotan. Istilah "disorot" menunjukkan adanya perhatian yang besar dari pihak tertentu, dalam hal ini Bawaslu, terhadap perubahan yang dianggap penting dan krusial dalam konteks pemilihan umum.
Framing ini menciptakan kesan bahwa ada masalah yang perlu diatasi, dan Bawaslu berperan sebagai pihak yang akan mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Awalan berita langsung menekankan perhatian Bawaslu terhadap perubahan mekanisme debat yang menimbulkan persoalan bagi beberapa pihak. Dengan menyebutkan bahwa Bawaslu akan

memastikan langkah KPU, lead ini menunjukkan proaktifnya Bawaslu dalam menjaga transparansi dan kepatuhan terhadap hukum pemilu.
Hal ini menciptakan kesan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab besar untuk mengawasi jalannya pemilihan dan menjaga integritas proses demokrasi.
Latar berita ini berfungsi untuk memberikan konteks mengenai perdebatan dan keluhan yang muncul akibat perubahan mekanisme debat. Di sini, Bawaslu disebutkan berlokasi di Bandung, Jawa Barat, yang memberikan gambaran bahwa pembicaraan ini berlangsung dalam kerangka resmi. Latar juga mencakup referensi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, menegaskan bahwa semua langkah KPU harus sesuai dengan peraturan yang ada, sehingga menambah legitimasi pernyataan Bawaslu.berita ini merinci proses komunikasi antara KPU dan tim kampanye capres-cawapres. Penjelasan Ketua KPU mengenai kehadiran capres dan cawapres di panggung debat dan proporsi bicara masing-masing kandidat memberikan gambaran jelas mengenai mekanisme debat yang akan diterapkan. Melalui penjelasan ini, berita berusaha menunjukkan bahwa KPU tetap berpegang pada prinsip kerja sama tim di antara pasangan calon, meskipun ada perubahan format.
Ini menunjukkan dinamika di antara tim kampanye dan KPU dalam mengatasi masalah yang ada.Penutup berita berisi informasi tentang tema debat yang akan diangkat dalam lima kali debat yang akan digelar di Jakarta. Dengan merincikan tema-tema tersebut, penutup memberikan gambaran tentang substansi debat yang akan datang dan mengarahkan pembaca untuk memahami bahwa debat tersebut sangat relevan dan penting bagi pemilih. Penutup ini juga menciptakan kesan bahwa KPU telah siap mengatur debat dengan jelas dan terstruktur, meskipun terdapat kritik dan keluhan yang muncul sebelumnya.
Secara keseluruhan, analisis framing ini menunjukkan bagaimana berita menyusun narasi seputar perubahan metode debat capres-cawapres, dengan Bawaslu sebagai pengawas yang kritis dan KPU sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab. Penggunaan struktur sintaksis yang efektif membantu menyampaikan pesan bahwa meskipun ada tantangan dalam mekanisme debat, semua pihak berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi proses pemilu.

Analisis Skrip

Who : - Perwakilan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) Lolly Suhenty
- Anggota KPU (Komisi Pemilihan Umum) Hasyim Asy'ari.

What: Berita ini membahas perubahan mekanisme debat capres dan cawapres yang menuai banyak keluhan dari berbagai pihak. Bawaslu menyoroti hal ini dan menyatakan bahwa mereka akan memastikan langkah-langkah yang diambil oleh KPU terkait perubahan format debat, serta kepatuhan KPU terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

When :Peristiwa ini terjadi pada Selasa, 5 Desember 2023 saat Lolly Suhenty memberikan pernyataan terkait perubahan mekanisme debat. Selain itu, informasi mengenai jadwal debat capres-cawapres juga disebutkan, dengan debat pertama dijadwalkan pada 12 Desember 2023

Where : Diskusi dan pernyataan ini berlangsung di Kantor KPU Jakarta Pusat. Lokasi ini penting karena menegaskan bahwa pengawasan dan keputusan terkait pemilu berlangsung di

pusat kegiatan KPU.

Why : Alasan di balik sorotan Bawaslu terhadap perubahan metode debat adalah untuk memastikan bahwa KPU tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Ada kekhawatiran terkait keluhan yang muncul dari pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat perubahan tersebut. Framing ini menunjukkan bahwa transparansi dan kepatuhan hukum adalah prioritas utama dalam proses demokrasi.

How : Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan KPU untuk memastikan semua langkah yang diambil dalam debat capres-cawapres sesuai dengan undang-undang. Hal ini mencakup penegasan bahwa capres dan cawapres harus hadir secara lengkap di atas panggung pada setiap debat, dengan proporsi bicara yang berbeda sesuai format debat yang ditentukan. Framing berita ini menunjukkan upaya Bawaslu untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilihan, dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap hukum. KPU digambarkan sebagai institusi yang perlu bertanggung jawab atas setiap perubahan yang dilakukan, sedangkan Bawaslu berperan sebagai pengawas yang memastikan bahwa semua langkah yang diambil selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan penekanan pada musyawarah dan koordinasi, berita ini membentuk citra positif tentang proses demokrasi di Indonesia, meskipun ada tantangan dan ketidakpuasan dari berbagai pihak terkait format debat yang baru.

Analisis Tematik

Analisis framing dalam berita berjudul "Perubahan Metode Debat Capres-Cawapres Disorot, Bawaslu Bakal Pastikan Langkah KPU" dapat dipecah menjadi beberapa unsur tematik yang mengedepankan fokus utama berita serta konteks yang dibawa.
Berikut adalah analisisnya: Berita ini berfokus pada perubahan mekanisme debat capres dan cawapres yang menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk Bawaslu. Tema ini mencerminkan adanya ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan stakeholder terkait bagaimana perubahan tersebut akan memengaruhi jalannya debat dan kualitas pemilihan. Dengan mencolokkan “perubahan mekanisme,” berita ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dari KPU dalam melaksanakan tugasnya.
Dalam berita ini, Bawaslu muncul sebagai lembaga pengawas yang aktif dalam menanggapi isu perubahan mekanisme debat. Melalui pernyataan anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, ditekankan bahwa Bawaslu akan memastikan langkah KPU sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan penegasan ini, berita membingkai Bawaslu sebagai entitas yang berkomitmen menjaga integritas pemilu dan mendorong kepatuhan pada regulasi yang ada.
Perspektif Hukum dan Regulasi : Framing juga menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap hukum dalam konteks perubahan ini. Pernyataan Lolly Suhenty tentang larangan bagi KPU untuk menyalahi ketentuan hukum menunjukkan adanya kerangka hukum yang harus dipatuhi. Ini menambah bobot legalitas pada perdebatan yang terjadi dan memperkuat narasi bahwa segala langkah KPU harus bersandar pada regulasi yang jelas. Dengan menyoroti aspek hukum, berita ini menciptakan kesan bahwa perubahan tersebut tidak bisa diambil sembarangan, tetapi harus melalui proses yang tepat.
Komunikasi dan Koordinasi : Berita ini juga menyentuh pentingnya komunikasi antara KPU dan tim kampanye. Penjelasan bahwa KPU telah mengundang tim kampanye untuk menjelaskan

teknis pelaksanaan debat menggambarkan upaya untuk memastikan semua pihak memahami dan setuju dengan mekanisme yang akan diterapkan. Dengan cara ini, framing ini mengedepankan dialog sebagai bagian integral dari proses pemilihan, menciptakan suasana kolaboratif di tengah ketegangan yang ada.Tema Debat yang Ditetapkan . Menyediakan informasi mengenai tema debat yang akan datang, serta rincian jadwal, membentuk narasi yang jelas tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Ini bukan hanya menambah informasi bagi pembaca tetapi juga menunjukkan bahwa meskipun ada perdebatan dan isu terkait mekanisme debat, KPU tetap melangkah maju dengan perencanaan yang matang. Ini membentuk kesan bahwa meskipun ada ketidakpastian, proses demokrasi terus berjalan dengan fokus yang jelas.Secara keseluruhan, berita ini mengedepankan tema perubahan mekanisme debat sebagai isu sentral yang melibatkan berbagai pihak. Melalui keterlibatan Bawaslu, aspek hukum, komunikasi antar lembaga, dan perencanaan debat, framing ini menciptakan narasi bahwa meskipun ada tantangan, pemilihan tetap diatur oleh prinsip-prinsip demokrasi yang transparan dan sesuai hukum. Hal ini menggambarkan dinamika yang kompleks dalam proses pemilihan dan menekankan pentingnya kolaborasi serta kepatuhan terhadap regulasi dalam menjaga integritas demokrasi.

Analisis Retoris

Pernyataan Bawaslu Sebagai Pengawas : Dalam berita ini, Bawaslu melalui Lolly Suhenty menggunakan retorika pengawasan dengan menekankan bahwa Bawaslu akan memastikan KPU bertindak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan kata-kata seperti “memastikan” dan “langkah-langkah KPU,” framing ini menampilkan Bawaslu sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga kepatuhan terhadap aturan, menunjukkan kewaspadaan dan ketegasan Bawaslu dalam mengawal proses pemilu.

Sorotan Terhadap Perubahan Format : Berita ini juga menggunakan retorika kekhawatiran dengan menyebutkan “keluhan” yang muncul dari perubahan format debat capres-cawapres. Framing ini menampilkan perubahan tersebut sebagai sesuatu yang kontroversial dan menimbulkan pertanyaan di kalangan publik, serta mengangkat potensi ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menciptakan kesan bahwa perubahan format debat perlu dipantau lebih ketat.
KPU sebagai Pihak yang menenangkan: KPU, melalui pernyataan Hasyim Asy'ari dan Idham Holik, menggunakan retorika klarifikasi untuk meredakan ketegangan dengan menjelaskan bahwa meski format berubah, semua pasangan calon tetap akan hadir dalam debat. Pernyataan KPU ini diframing sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidak mengurangi kualitas demokrasi, melainkan berfokus pada kerja sama tim capres-cawapres. KPU ingin memperlihatkan bahwa mekanisme yang baru dirancang agar pemilih dapat menilai sinergi pasangan calon, dan ini diungkapkan dengan nada optimis.

Tema-tema Debat: Penjelasan mengenai tema-tema debat yang disampaikan oleh KPU memperkuat framing bahwa proses debat tetap berjalan terstruktur dan memiliki bobot substansial. Dengan menyebut tema seperti hukum, HAM, ekonomi, dan lingkungan hidup, berita ini memberikan kesan bahwa debat akan mencakup isu-isu penting yang berhubungan langsung dengan kebutuhan publik. Hal ini berfungsi untuk memperkuat legitimasi format debat yang baru di mata publik.Secara keseluruhan, framing berita ini menciptakan narasi bahwa perubahan mekanisme debat Pilpres telah memicu berbagai respons, baik pengawasan dari Bawaslu maupun

klarifikasi dari KPU. Dengan menampilkan Bawaslu sebagai pengawas yang berhati-hati dan KPU sebagai pihak yang berusaha menenangkan, berita ini menekankan pentingnya menjaga demokrasi yang transparan dan sesuai aturan, sembari meredakan kekhawatiran publik terhadap perubahan format debat.

Analisis framing dari *Suara.com* :

Berita 1, "KPU Hapus Debat Cawapres, Ganjar Pranowo: Saya Siap Hadapi Skenario Apapun!" menekankan bahwa meskipun terjadi penghapusan debat khusus cawapres oleh KPU, Ganjar Pranowo tetap tampil sebagai calon yang tangguh dan adaptif. Berita ini menyusun narasi melalui sintaksis yang jelas, mulai dari judul yang menggabungkan elemen kebijakan dan respons politis, hingga penyampaian konteks latar, jadwal, dan tema debat yang telah ditetapkan oleh KPU. Dalam analisis skrip, disorot bahwa Ganjar dengan tegas menyatakan kesiapan mental dan strategisnya untuk menghadapi berbagai kemungkinan format debat, sehingga mengukuhkan citra seorang pemimpin yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan kebijakan. Tema-tema kunci yang diangkat kesiapan politik, perubahan format debat, dan keterbukaan informasi secara keseluruhan membentuk persepsi bahwa meskipun terdapat penyesuaian besar, proses demokrasi Pilpres 2024 tetap berjalan dengan sistem yang terstruktur dan transparan. framing menonjolkan ketenangan dan kesiapan Ganjar Pranowo dalam menghadapi perubahan format debat yang diinisiasi oleh KPU, meskipun berita juga memperlihatkan bahwa perubahan tersebut bisa mereduksi visi masyarakat terhadap peran individu calon wakil presiden. Framing ini membentuk citra Ganjar sebagai capres yang fleksibel dan siap berhadapan dengan berbagai keadaan, meskipun ada ketegangan terkait perubahan format yang mungkin mempengaruhi strategi kampanye. Analisis ini mencerminkan bagaimana media menampilkan Ganjar dalam situasi yang penuh tantangan, tetapi menunjukkan optimisme serta kesiapan yang dinilai penting untuk seorang calon pemimpin.

Berita 2, “Saling Tuding, Tim Kampanye Soal Usulan Mekanisme Debat Pilpres, KPU: Biasa Dalam Demokrasi," menampilkan dinamika konflik internal antara tim kampanye yang muncul akibat perbedaan pandangan mengenai usulan penghapusan debat khusus cawapres. Framing berita ini disusun secara sistematis dengan menekankan bahwa perdebatan dan saling tuding antar tim kampanye merupakan bagian wajar dari proses demokrasi. Berita ini mengutip pernyataan dari berbagai pihak, seperti Grace Natalie dan Nihayatul Wafiroh, yang menunjukkan adanya ketegangan dan perbedaan strategi kampanye, sedangkan KPU melalui Idham Holik menekankan pentingnya musyawarah untuk meredakan konflik tersebut. Dengan demikian, narasi yang dibangun menyoroti bahwa meskipun terdapat perselisihan internal, mekanisme musyawarah dan komunikasi terbuka antar aktor politik merupakan elemen kunci untuk menjaga integritas dan transparansi dalam proses pemilu media menekankan elemen konflik dan ketegangan di antara tim kampanye capres-cawapres terkait mekanisme debat, dengan “saling tuding” menjadi sorotan utama. Framing ini menunjukkan dinamika perdebatan dalam proses demokrasi, tetapi juga menyiratkan bahwa konflik ini akan berpotensi memberi dampak negatif pada legitimasi proses Pemilu. KPU, dalam peranannya, diberi posisi sebagai lembaga yang mengakomodasi musyawarah untuk mencapai kesepakatan di tengah perbedaan pandangan antar pihak. Analisis retoris sangat mencerminkan diskusi yang terjadi antar tim kampanye yang turut diimbangi dengan pernyataan pihak KPU yang berusaha menjaga komunikasi dan keterbukaan demi kelancaran proses pemilihan. Framing ini juga memosisikan KPU sebagai tanggap, meskipun

tengah menghadapi perbedaan pendapat dan tantangan dalam preferensi format debat.

Berita 3 "Perubahan Metode Debat Capres-Cawapres Disorot, Bawaslu Bakal Pastikan Langkah KPU," mengarahkan perhatian pada aspek pengawasan institusional dan kepatuhan terhadap regulasi. Dalam framing ini, Bawaslu tampil sebagai pengawas yang tegas, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh KPU sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, sekaligus menanggapi keluhan terkait perubahan format debat. Narasi yang dibangun melalui analisis sintaksis, skrip, dan retoris menggambarkan bahwa meskipun terdapat kekhawatiran dari berbagai pihak, upaya koordinasi dan dialog antara KPU dan tim kampanye tetap berjalan untuk menjaga proses debat agar transparan dan akuntabel. Secara keseluruhan, meskipun Suara.com berupaya menyajikan informasi secara objektif, pemilihan sudut pandang, penekanan tema, dan struktur narasi yang digunakan menunjukkan adanya pengaruh orientasi editorial. Hal ini mengindikasikan bahwa ideologi perusahaan turut mempengaruhi framing berita, sehingga nilai-nilai dan pandangan ideologis yang dianut oleh media tercermin dalam cara informasi disajikan dan berpotensi membentuk persepsi publik terhadap proses demokrasi dan kebijakan penyelenggara pemilu.mengarahkan fokus pada peran penting Bawaslu yang mengawasi secara ketat perubahan mekanisme debat untuk menjaga integritas pemilu. Framing ini menjaga citra Bawaslu sebagai entitas yang berwenang memastikan kepatuhan terhadap hukum, dengan menggarisbawahi bahwa meskipun muncul keluhan dari berbagai pihak, KPU diharuskan tetap berada dalam batasan-batasan hukum yang ditentukan. Dalam analisis tematik, ada upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pemilu, serta meneguhkan nilai-nilai musyawarah di dalam tubuh demokrasi. Meskipun demikian, framing ini memperlihatkan bahwa beberapa pihak perlu diperhatikan dan diakomodasi agar potensi masalah dan keluhan terkait mekanisme debat dapat diselesaikan dengan baik. Terkait dengan pengaruh ideologi perusahaan dalam framing berita-berita ini, dapat disimpulkan bahwa ideologi *suara.com* mempengaruhi cara mereka memilih dan mengemas berita, seiring dengan komitmennya sebagai media yang mengutamakan prinsip-prinsip ekonomi politik yang mendorong keterbukaan dan kritik terhadap proses pemilu. Melalui pendekatan ini, media berusaha untuk mempertahankan objektivitas sambil memberikan ruang bagi pembacanya untuk mencerna sisi-sisi kritik yang diajukan para tokoh terkait proses perubahan debat Pilpres 2024. Dengan memfokuskan pada elemen-elemen yang memengaruhi jalannya demokrasi, dan menekankan transparansi serta pengawasan institusional, Suara.com menyusun framing yang memberi gambaran tentang dinamika ketegangan dalam pentas politik Indonesia, sambil menekankan nilai demokrasi dan proses hukum yang seiring berjalan dengan agenda penyelenggara pemilu.

Pengemasan framing *suara.com* lebih subjektif dengan menekankan aspek interaksi politik yang terjadi dalam kontestasi Pilpres 2024, khususnya dalam isu debat capres-cawapres. Dalam pemberitaannya, *suara.com* menggunakan pendekatan yang lebih menyoroti perbedaan pandangan antara tim kampanye dan tokoh politik, sehingga menciptakan narasi yang menggambarkan adanya ketegangan dan perdebatan di antara tokoh politik tersebut. Framing yang digunakan cenderung memperlihatkan dinamika politik secara lebih konfrontatif dengan menampilkan respons dari berbagai pihak, baik kritik maupun pembelaan terhadap kebijakan atau keputusan yang diambil, termasuk kebijakan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dengan menampilkan kritik, tanggapan, dan respons dari berbagai pihak, *suara.com* membingkai isu debat Pilpres 2024 sebagai arena perdebatan politik yang penuh dengan dinamika dan ketegangan antara kandidat serta tim kampanye mereka.

Dalam analisis framing ini, pemberitaan *suara.com* lebih banyak berfokus pada konflik kepentingan dan perbedaan strategi politik yang ditampilkan melalui pernyataan dan aksi tim kampanye, sehingga membentuk persepsi publik mengenai perselisihan dan adu strategi yang terjadi dalam proses pemilu. Dengan demikian, cara *suara.com* mengemas pemberitaan tidak hanya menyoroti substansi debat, tetapi juga membingkai isu tersebut dalam konteks persaingan politik yang lebih luas, di mana kritik, perbedaan pandangan, serta respons dari masing-masing pihak menjadi elemen utama dalam narasi yang dibangun.

KESIMPULAN

Hasil analisis framing dari berita pada *kompas.com* dan *suara.com* mengenai Pilpres 2024 menunjukkan adanya perbedaan dalam pendekatan kedua media terhadap isu yang sama.
kompas.com lebih menekankan pada aspek institusional dan penjelasan formal mengenai perubahan format debat capres-cawapres oleh KPU. Framing yang digunakan cenderung netral dan fokus pada proses demokrasi serta tanggapan dari berbagai pihak, seperti KPU dan Bawaslu, yang berusaha menjelaskan alasan perubahan format debat sebagai upaya menampilkan sinergi capres-cawapres. Berita-berita *kompas.com* mengedepankan analisis mendalam tentang dampak perubahan ini terhadap legitimasi pemilu, tanpa memberikan penilaian negatif yang jelas terhadap salah satu pihak.
suara.com di sisi lain, menonjolkan dinamika konflik politik antara tim kampanye. Berita-beritanya cenderung lebih menekankan pada respons tokoh politik dan perdebatan di antara tim kampanye capres-cawapres. Framing yang digunakan lebih bersifat konfrontatif dengan menampilkan ketegangan dan saling tuding antar tim kampanye, sehingga menonjolkan sisi perselisihan politik dalam isu debat Pilpres 2024. *suara.com* berusaha membingkai berita dengan memberi ruang pada kritik dan respons kandidat terhadap keputusan KPU.
Secara keseluruhan, *kompas.com* berfokus pada penjelasan kebijakan KPU dalam konteks prosedural dan hukum, sedangkan *suara.com* lebih menyoroti dimensi politik dan konflik antar kandidat serta menonjolkan dinamika politik dan respons kandidat . Meski demikian, keduanya berupaya untuk menjaga keseimbangan informasi dengan tetap memberikan perspektif yang berbeda tentang perubahan format debat Pilpres 2024.

DAFTAR REFERENSI

Alvin, S. (2022). Framing Analysis of 2024 General Election Postponement Issue in CNNIndonesia.com and Kompas.com. *Jurnal SEMIOTIKA*, *16*(2), 133–148. Retrieved from http://journal.ubm.ac.id/

Farisa, F. C. (2023). Ubah Format Debat Capres-Cawapres, Kredibilitas KPU Dipertaruhkan. Retrieved November 29, 2024, from https://nasional.kompas.com/read/2023/12/04/11341721/ubah-format-debat-capres-cawapres-kredibilitas-kpu-dipertaruhkan

Iswinarno, C., & Irianto, D. H. (2023). Saling Tuding Tim Kampanye Soal Usulan Mekanisme Debat Pilpres, KPU: Biasa dalam Demokrasi. Retrieved November 30, 2024, from https://www.suara.com/kotaksuara/2023/12/04/212517/saling-tuding-tim-kampanye-soal-usulan-mekanisme-debat-pilpres-kpu-biasa-dalam-demokrasi

Lesmana, A. S. (2023). KPU Hapus Debat Cawapres, Ganjar Pranowo: Saya Siap Hadapi

Skenario Apa Pun! Retrieved November 30, 2024, from https://www.suara.com/kotaksuara/2023/12/03/112204/kpu-hapus-debat-cawapres-ganjar-pranowo-saya-siap-hadapi-skenario-apa-pun

Mantalean, V., & Sari, N. (2023). Duduk Perkara Debat Pilpres 2024: Debat Cawapres Tetap Ada, tapi Didampingi Capres. Retrieved November 29, 2023, from https://nasional.kompas.com/read/2023/12/03/08501371/duduk-perkara-debat-pilpres-2024-debat-cawapres-tetap-ada-tapi-didampingi

Meilani, D. N. S. (2022). Analisis Framing PAN Dan Kosicki: Hibah Bunda Pintar Tempo. Co Dan CNN Indonesia. *KOLASE*, *1*(1), 1–10.

Puji, S. (2016). Konstruksi Sosial Media Massa Puji Santoso Dosen Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Al-Balagh*, *1*(1), 34.

Puspianto, A. (2022). Volume X Nomor 1 September 2021 – Februari 2022. *An-Nida: Jurnal Prodi Ilmu Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, *X*(1), 1–22.

Rosmilawati, S. … Rahman, S. (2022). Analisis Framing Pemberitaantentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalteng Tahun 2020 Pada Portal Berita Online Tabengan.Co.Id Dan Prokalteng.Co. *Jurnal Darma Agung*, *30*(3), 1131. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v30i3.2391

Sari, R. R. N., & Irianto, D. H. (2023). Perubahan Metode Debat Capres-Cawapres Disorot, Bawaslu Bakal Pastikan Langkah KPU. Retrieved November 30, 2023, from https://www.suara.com/kotaksuara/2023/12/05/141736/perubahan-metode-debat-capres-cawapres-disorot-bawaslu-bakal-pastikan-langkah-kpu

Setuningsih, N., & Ulya, F. N. (2023). Soal Polemik Debat Cawapres, Bawaslu: Mau Didampingi Capres Apa Tidak, Terserah…. Retrieved November 29, 2024, from https://nasional.kompas.com/read/2023/12/05/15332061/soal-polemik-debat-cawapres-bawaslu-mau-didampingi-capres-apa-tidak-terserah